

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, Ismail, B., & Ery Mujahiddin, D. (2013). Implementasi Penghijauan Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Kecamatan Sekolaq Kabupaten Kutai Darat. *Jurnal Ilmu Pertanian Dan Kehutanan*, 12(2). <https://doi.org/10.31293/af.v12i2.329>
- Alfian, A., Farid Rachmaditya, R., Marliyana, R., Apriliany, S., & Adiansyah, D. (2020). Pendekatan Active Citizen dalam Pemetaan Masalah Terkait Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum di Desa Sindangpakuon. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.24198/kumawula.v3i1.24588>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arafat. (2023). *Kebijakan Publik* (Vol. 2).
- Arsyad, S. (2010). *Konservasi Tanah dan Air*.
- Asdak, C. (2022). *Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai: Yogyakarta UGM Press*.
- Bila, A., & Saputra, B. (2019). *Strategi Collaborative Governance Dalam Pemerintahan 1 Collaborative Governance Strategy in Government Sector*. 196–210.
- Ditya Permana, D., & L Vini Siregar, R. (2022). Komunikasi Mitigasi Bencana oleh BPBD Provinsi Bengkulu pada Masyarakat di Daerah Aliran Sungai Lemau. *Journal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 6(1). <https://doi.org/10.30829/komunikasilogi.v6i1.12464>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- F. Riswulan, Y., Sukri Banuwa, I., Aman Damai, A., & Suroso, E. (2021). Yanthi F. R., et al. 2021 *Jurnal Riset Pembangunan Berkelanjutan Assessment of the impact of Damage to the Bulok River Basin on Hydrological. jurnal riset pembangunan berkelanjutan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanggamus. 01. no 01(01), 46–57.*
- Faizal Saputra, M., & Tukiman. (2022). Collaborative Governance dalam Pengembangan Wilayah Ruang Terbuka Hijau (RTH) pada Kawasan Bantaran Sungai Jagir Wonokromo Kota Surabaya. *Jurnal Nolken: Ilmu Ilmu Sosial*, 8(1), 1–4. <https://doi.org/10.56304/s0040363622080021>

- Gitahapsari, D., & Zarkasyi Rahman, A. (2016). Implementasi Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Melalui Kegiatan Hutan Rakyat Di Desa Kalisidi Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 5(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i3.12561>
- Hadi, A. R., Sugiyarto, S., & Mutaqin, A. Y. (2019). Analisis Prioritas Rehabilitasi Kerusakan Pada Daerah Aliran Sungai (DAS) Grompol Hilir Kabupaten Sragen, Jawa Tengah Dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP). *Matriks Teknik Sipil*, 7(3), 233–239. <https://doi.org/10.20961/mateksi.v7i3.36493>
- Handoko, T., Syofian, ., & Tinov, M. . T. (2018). Collaborative Governance Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Oleh Aktivitas Industri Pada Daerah Aliran Sungai (Das) Siak Di Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrative Reform*, 6(3), 102. <https://doi.org/10.52239/jar.v6i3.1904>
- Harmiati, H., Aprianty, H., Supriyono, S., Sulistyo, B., Triyanto, D., & Alexsander, A. (2018). Implementasi Good Enviromental Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Das) Bengkulu. *Jurnal Ilmu Pemerintahan : Kajian Ilmu Pemerintahan Dan Politik Daerah*, 3(2), 136. <https://doi.org/10.24905/jip.v3i2.1003>
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris*.
- Irianto, K. (2006). Buku Ilmu Lingkungan. In D. Ni Nyoman Aryaningsih (Ed.), *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Iriawan, H. (2024). *Teori Kebijakan Publik*.
- Isrun. (2009). Analisis Tingkat Kerusakan Lahan Pada Beberapa SUB DAS di Kawasan Danau Poso. *Media Litbang Sulteng*, 2(1), 67–74.
- Kadir, S., Badaruddin, & Rini Indrayatie, E. (2020). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*.
- Lusiana, Ali Akbar, A., & Desmaiani, H. (2021). Pengaruh Aktivitas Manusia Terhadap Beban Pencemaran Sub DAS Sungai Rengas, Kalimantan Barat. *Jurnal Teknologi Lingkungan Lahan Basah*, 09(2), 90–100.
- Marwiyah, S. (2022). *Kebijakan Publik*.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Moleong, L. . (2017). *Metologi Penelitian Terdahulu*.
- Naharuddin, Harijanto, H., & Wahid, A. (2018). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Aplikasinya dalam Proses Belajar Mengajar*.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *Collaborative Governance*. <https://repository.unair.ac.id/126355/1/4>.

- Nugroho, B., Basir, & Kadir, S. (2024). Strategi Keberhasilan Kegiatan Rehabilitasi Pada Daerah Aliran Sungai Kapuas Di Kabupaten Kapuas. *Jurnal Hutan Tropis*, 12(3), 398. <https://doi.org/10.20527/jht.v12i3.20558>
- Paimin, Pramono, I. B., Purwanto, & Indrawati, D. R. (2012). *Sistem Perencanaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai* (Vol. 6, Number 0).
- Ridwan, M., & Sarjito, J. (2024). Studi Kajian Dampak Perubahan Tutupan Lahan terhadap Kejadian Banjir di Daerah Aliran Sungai. *Journal of Tropical Environmental Research*, 26(1), 38–45. <https://doi.org/10.20961/enviro.v26i1.93145>
- Rindi Yuliyanti, D. G. P. (2022). Peran Non-Governmental Organization Pattiro Jakarta Dalam Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 1(2), 125–129.
- Sembiring, T. B., Irmawati, Sabir, M., & Tjahyadi, I. (2024). Buku Ajar Metologi Penelitian (Teori dan Praktik). In *Buku Ajar Metodologi Penelitian* (Number 1).
- Soumena, W., Suwardji, Mulyati, & Susilowati, E. L. (2025). *Efektivitas Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai terhadap Pemulihan Hutan dan Daya Dukung Lahan di Kabupaten Lombok Barat The Effectiveness of Watershed Rehabilitation on Forest Recovery and Land Carrying Capacity in West Lombok Regency*. 4(3).
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*.
- Sulistiyono, & H.Nur, S. (2024). Pendampingan Masyarakat Memulihkan Lahan Kritis pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan DAS Citarum. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 07(01), 62–79.
- Surtiani, Y., & Budiati, L. (2015). Evaluasi Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Daerah Aliran Sungai (DAS) Juwana pada Kawasan Gunung Muria Kabupaten Pati. *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 11(1), 117–128.
- Susilowati, R., Khairunnas, K., Rafinzar, R., & Noor Fadhlia, M. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan. *Indonesian Governance Journal: Kajian Politik-Pemerintahan*, 5(2), 96–111. <https://doi.org/10.24905/igj.v5i2.66>
- Triyana, S. R., Siddha, A., & Abidin AS, Z. (2025). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citaru*Triyana, S. R., Siddha, A., & Abidin AS, Z. (2025). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Citarum di Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung*. 02(01).m di Kecam. 02(01).

- Wijaya, B. S., Feni Fitriani Putri Rozi, Sarach Respilia Sukma, & Kamilia Nadirah. (2024). Degradasi Lingkungan Dan Pembangunan Berkelanjutan: Efektivitas Kerja Sama Unep Dan Asean Dalam Mengatasi Permasalahan Lingkungan Hidup Di Asia Tenggara. *Indonesian Journal of International Relations*, 8(2), 375–391. <https://doi.org/10.32787/ijir.v8i2.530>
- Zulhadi, ., Pitono, A., & Wargadinata, E. L. (2023). *Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kawasan Citarum Harum di Kabupaten Bandung*. 5(1).



L

A

M

P

I

R

A

N



LAMPIRAN I
PANDUAN WAWANCARA
PANDUAN WAWANCARA

► **Waktu/Hari Tanggal**

Tempat :

► **Identitas Informan**

Nama :

Jabatan :

► **Pertanyaan**

Indikator: Keterlibatan Stakeholder

1. Apa peran dan tanggung jawab instansi/lembaga Bapak/Ibu dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Lemau?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan instansi/lembaga Bapak/Ibu sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan Program RHL?
3. Stakeholder apa saja yang terlibat dalam pelaksanaan Program RHL dan bagaimana bentuk kerja sama yang dilakukan?

Indikator: Kesamaan Tujuan

4. Bagaimana tujuan instansi/lembaga Bapak/Ibu dalam mendukung Program RHL?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah seluruh stakeholder telah memiliki tujuan yang sama dalam pelaksanaan Program RHL?

Indikator: Komunikasi

6. Bagaimana komunikasi dan koordinasi yang dilakukan dengan stakeholder lain selama pelaksanaan Program RHL?
7. Media atau forum apa yang digunakan untuk membangun komunikasi antar stakeholder?
8. Apakah stakeholder diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau masukan dalam perencanaan maupun pelaksanaan Program RHL?

Indikator: Kepercayaan

9. Bagaimana kepercayaan antar stakeholder dibangun selama pelaksanaan Program RHL?
10. Menurut Bapak/Ibu, apakah hubungan kerja sama antar stakeholder berjalan dengan baik? Mengapa

Indikator: Pembagian Peran

11. Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab antar stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL?
12. Apakah pembagian peran tersebut sudah berjalan sesuai dengan kewenangan masing-masing stakeholder

LAMPIRAN II

TRANSKIP WAWANCARA

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Agus Sukanto S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Evaluasi DAS

Instansi : BPDAS Ketahun

Penulis	Apa peran dari BPDAS Ketahun terhadap kebijakan RHL di DAS Lemau di Bengkulu Tengah?
Informan	BPDAS Ketahun disini berperan sebagai perencana, pelaksana dan juga penilai terhadap kebijakan ataupun program dari RHL di kawasan hutan di wilayah DAS Lemau, jadi untuk kegiatan RHL itu tentunya kita yang bertugas untuk merencanakan sesuai dengan kesepakatan, biasanya kita akan mengadakan rapat internal dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan stakeholder lain, seperti kegiatan sosialisasi kita akan mengundang dan biasanya akan ada SK kegiatan ataupun undangan dari BPDAS Ketahun.
Penulis	Siapa saja stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan RHL pada DAS Lemau?
Informan	Untuk dari kelembagaannya sendiri itu ada kita sendiri yaitu BPDAS Ketahun, DLHK Provinsi, KPHL Bukit Daun, Pemerintah Bengkulu Tengah, Pemerintah Desa, LSM/NGO, dan Kelompok Tani Hutan. Dan untuk desa nya itu dipilih berdasarkan dengan kawasan yang mempunyai kawasan yang kritis, biasanya di pedesaan dan merupakan kawasan dimana para masyarakat menggarap perkebunan ataupun pemilik kebun.
Penulis	Bagaimana proses penentuan stakeholder yang dilibatkan dalam program RHL di DAS Lemau?
Informan	Kita akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang undangan tentunya dan survei sosial ekonomi masyarakat
Penulis	Bagaimana Bentuk Partisipasi masing masing stakeholder dalam pelaksanaan program RHL?

Informan	BPDAS Ketahun, DLHK Provinsi Bengkulu, KPHL Bukit Daun itu sebagai Perencana, Pelaksana, dan penilai sementara pemerintah Bengkulu tengah dan pemerintah desa itu memberikan dukungan kebijakan dan fasilitasi
Penulis	Apakah seluruh stakeholder selalu hadir dalam setiap tahapan pelaksanaan program RHL?
Informan	Selalu Hadir, pelibatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penilaian, hingga serah terima pekerjaan.
Penulis	Apakah terdapat stakeholder yang kurang aktif dalam pelaksanaan program RHL dan forum ? Apa penyebabnya?
Informan	Kalau untuk stakeholder itu semuanya pasti ikut, namun ada beberapa yang belum bisa ikut, pemerintah kabupaten biasanya karena keterbatasan wewenang dan juga biaya anggaran, untuk di semua forum semuanya ikut serta dan semuanya aktif.
Penulis	Apakah stakeholder yang terlibat memiliki latar belakang dan tugas yang berbeda dan apakah itu memengaruhi pelaksanaan program RHL?
Informan	Iya, karena stakeholder yang ikut itu biasanya adalah yang memiliki basis kerja di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, di pemerintahan sendiri itu memang tugasnya untuk melaksanakan kebijakan dan fungsi dari instansi masing masing, seperti BPDAS Ketahun yang mempunyai basis kehutanan dan lingkungan di bidang Daerah Aliran Sungai, jadi tugas kita tentunya melaksanakan kebijakan ataupun program mengenai DAS dan salah satunya adalah RHL di DAS yang dari BPDAS sendiri itu memiliki kawasan DAS yang memang menjadi kewenangannya. Sangat berpengaruh, sebelumnya keterlibatan terbatas, namun sekarang keterlibatan stakeholder meningkat seiring perubahan kebijakan RHL.
Penulis	Apakah pernah terjadi perbedaan kepentingan antar stakeholder dalam program RHL di DAS Lemau? Dan jika ada bagaimana BPDAS menyelaraskan tujuan antar stakeholder?
Informan	Pernah terjadi, untuk stakeholder pemahamannya belum sama dan cara dari kita sendiri itu melalui peningkatan kesepahaman dan peningkatan keterlibatan dalam kegiatan RHL, biasanya kita akan membuat kegiatan nah disitu adalah waktu dimana kita menyelaraskan tujuan bersama.

Penulis	Bagaimana komunikasi dilakukan antara BPDAS dengan stakeholder lain?
Informan	Kita akan melakukan pendekatan personal dan struktural, dan biasanya saat kegiatan seperti rapat dan penyampaian surat secara resmi, selain itu melalui keterlibatan dalam tim penyusunan kegiatan RHL, berkomunikasi lewat sosial media berupa <i>Whatsapp</i> atau telepon.
Penulis	Apa saja biasanya yang dibahas dalam rapat koordinasi?
Informan	Kegiatan nya berupa bagaimana bentuk kegiatan dari RHL Itu sendiri, bagaimana cara pelaksanaannya, pembahasan dan hasil monitoring dan evaluasi
Penulis	Bagaimana dari BPDAS Ketahun membangun kepercayaan dari stakeholder lain? Dan bagaimana
Informan	BPDAS Ketahun membangun kepercayaan antar stakeholder melalui penyampaian informasi dan data yang jelas, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan serta kontrak yang telah disepakati, serta menerapkan prinsip transparansi dalam setiap tahapan program. Transparansi diwujudkan melalui penyusunan perencanaan secara bersama (multistakeholder) dan pelaksanaan kegiatan oleh kelompok tani. Meskipun pernah terjadi kendala yang berkaitan dengan komunikasi dan pelaksanaan fisik di lapangan, BPDAS terus menjaga kepercayaan dengan memperkuat komunikasi, keterbukaan informasi, dan koordinasi dengan seluruh stakeholder. Secara umum, seluruh stakeholder telah menunjukkan komitmen yang baik dalam mendukung pelaksanaan Program RHL.
Penulis	Bagaimana pembagian peran masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL mulai dari pelaksanaan, monitoring, evaluasi, hingga bagaimana pembagian tugas dan kewenangan tersebut dilaksanakan di lapangan?

Informan	Pembagian tugas dan tanggung jawab antar stakeholder telah dilakukan sesuai dengan kewenangan dan perencanaan yang telah ditetapkan. Seluruh stakeholder terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan BPDAS Ketahun, DLHK Provinsi Bengkulu, KPHL Bukit Daun, serta Kelompok Tani. Secara umum kapasitas sumber daya manusia telah mendukung pelaksanaan Program RHL, meskipun kapasitas kelompok tani masih perlu ditingkatkan. Kolaborasi antar stakeholder telah berjalan cukup baik, terutama di dalam kawasan hutan, namun masih memerlukan peningkatan di luar kawasan hutan. Hambatan utama yang dihadapi meliputi belum optimalnya kesamaan tujuan, keterbatasan akses menuju lokasi kegiatan, serta kapasitas kelompok tani yang masih lemah. Untuk mengatasi hambatan tersebut, BPDAS melakukan pendekatan dan komunikasi secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas kelompok tani, memperbaiki aspek teknis pelaksanaan, memperkuat koordinasi antar stakeholder, serta mendorong sinkronisasi program dan anggaran agar kolaborasi berjalan lebih opti
----------	--



- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Yudi Riswanto S.Hut., M.Si

Jabatan : Kepala KPHL III Bukit Daun

Instansi : UPTD KPHL III Bukit Daun#

Penulis	Bagaimana Peran dan fungsi KPHL Bukit daun dalam mendukung pelaksanaan program RHL di DAS Lemau?
Informan	KPHL Bukit Daun merupakan UPTD di bawah DLHK Provinsi Bengkulu yang mengelola kawasan hutan lindung dan sebagian hutan produksi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam Program RHL, KPHL berperan sebagai pendamping pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDAS Ketahun.
Penulis	Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan KPHL Bukit Daun dalam pelaksanaan Program RHL?
Informan	KPHL terlibat dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan kelompok tani, pendampingan, penanaman, pemeliharaan tanaman (P-1 dan P-2), serta kegiatan konservasi tanah dan air seperti pembangunan dam penahan, dam pengendali, dan bronjong untuk mengurangi erosi.
Penulis	Bagaimana bentuk kerja sama KPHL Bukit Daun dengan stakeholder lain dalam pelaksanaan Program RHL?
Informan	KPHL bekerja sama dengan BPDAS Ketahun sebagai pelaksana utama kegiatan. Selain itu, KPHL berkolaborasi dengan penyuluh kehutanan, polisi kehutanan, perguruan tinggi sebagai tim penilai tanaman, serta kelompok tani dalam mendukung pelaksanaan Program RHL.
Penulis	Bagaimana pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam Program RHL?
Informan	Monitoring dilakukan secara berkala dengan diawali rapat koordinasi untuk membahas teknis kegiatan di lapangan. Setelah monitoring dilakukan dokumentasi tanaman, penilaian tingkat keberhasilan tanaman, dan penyusunan laporan sebagai dasar evaluasi maupun penyulaman tanaman.
Penulis	Bagaimana proses komunikasi dan koordinasi antar stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL?
Informan	Komunikasi dilakukan melalui grup WhatsApp, surat resmi, rapat koordinasi, dan sosialisasi kepada masyarakat di balai desa. Kegiatan tersebut melibatkan BPDAS, pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan, DLHK, serta stakeholder terkait lainnya.
Penulis	Bagaimana pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL?

Informan	BPDAS bertanggung jawab sebagai pelaksana utama Program RHL, sedangkan KPHL berperan sebagai pendamping, narasumber pelatihan, pendamping monitoring dan evaluasi, serta mendukung pengamanan kawasan melalui polisi kehutanan dan penyuluh kehutanan
Penulis	Bagaimana kondisi kolaborasi antar stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL?
Informan	Kolaborasi antar stakeholder telah berjalan dengan baik. Setiap kegiatan dilaksanakan melalui koordinasi bersama sehingga masing-masing stakeholder dapat menjalankan tugas sesuai perannya dalam mendukung keberhasilan Program RHL.
Penulis	Menurut Bapak, apa yang perlu dipertahankan atau ditingkatkan dalam pelaksanaan kolaborasi Program RHL?
Informan	Pelaksanaan koordinasi, komunikasi, monitoring, dan pendampingan perlu terus dipertahankan agar pelaksanaan Program RHL tetap berjalan efektif serta tingkat keberhasilan tanaman dapat terus meningkat.



IDENTITAS RESPONDEN

- Nama : Ahmad Sofiyan S.Hut.
- Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat
- Instansi : DLHK Provinsi Bengkulu

Penulis	Bagaimana keterlibatan DLHK Provinsi Bengkulu dalam pelaksanaan Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di DAS Lemau?
Informan	DLHK Provinsi Bengkulu terlibat melalui pembinaan kebijakan, koordinasi lintas instansi, serta ikut hadir dalam berbagai tahapan kegiatan di lapangan. Selain itu, DLHK bersama BPDAS Ketahun dan KPHL Bukit Daun melakukan monitoring untuk memastikan pelaksanaan rehabilitasi berjalan sesuai ketentuan.
Penulis	Apa tujuan DLHK Provinsi Bengkulu dalam mendukung Program RHL di DAS Lemau?
Informan	Tujuan DLHK adalah menjaga keberlanjutan kawasan hutan serta memastikan legalitas kawasan tetap terjaga agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Kesamaan tujuan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan BPDAS Ketahun, KPHL Bukit Daun, dan kelompok tani agar rehabilitasi berjalan berkelanjutan.
Penulis	Apa tujuan DLHK Provinsi Bengkulu dalam mendukung Program RHL di DAS Lemau?
Informan	Tujuan DLHK adalah menjaga keberlanjutan kawasan hutan serta memastikan legalitas kawasan tetap terjaga agar tidak menimbulkan konflik pemanfaatan lahan. Kesamaan tujuan tersebut diwujudkan melalui koordinasi dengan BPDAS Ketahun, KPHL Bukit Daun, dan kelompok tani agar rehabilitasi berjalan berkelanjutan.
Informan	Komunikasi dilakukan melalui jalur formal dan informal. Komunikasi formal digunakan dalam koordinasi kebijakan, tata batas kawasan, dan pelaksanaan program, sedangkan komunikasi informal dilakukan melalui tenaga pendamping KPHL Bukit Daun dan grup WhatsApp sehingga penyampaian laporan maupun pengaduan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif.
Penulis	Bagaimana DLHK membangun kepercayaan dengan stakeholder dalam pelaksanaan Program RHL?

Informan	Kepercayaan dibangun melalui transparansi dalam sinkronisasi kebijakan, penentuan tata batas kawasan, serta komitmen kelembagaan. Keterbukaan tersebut menumbuhkan keyakinan antar stakeholder bahwa Program RHL dilaksanakan secara akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku.
Penulis	Apa peran DLHK Provinsi Bengkulu dalam kolaborasi Program RHL di DAS Lemau?
Informan	DLHK berperan memberikan pembinaan, arahan kebijakan, koordinasi lintas sektor, serta mendukung sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaksanaan Program RHL berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.
Penulis	Bagaimana bentuk koordinasi DLHK dengan BPDAS Ketahun dan KPHL Bukit Daun?
Informan	Koordinasi dilakukan melalui pembinaan kebijakan, monitoring bersama di lapangan, penyelarasan pelaksanaan program, serta komunikasi yang berlangsung secara berkelanjutan agar setiap stakeholder menjalankan tugas sesuai kewenangannya.
Penulis	Mengapa koordinasi antar stakeholder penting dalam pelaksanaan Program RHL?
Informan	Karena pelaksanaan rehabilitasi melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan yang berbeda sehingga diperlukan koordinasi agar kebijakan, pelaksanaan di lapangan, dan kegiatan monitoring dapat berjalan secara terpadu dan mencapai tujuan rehabilitasi hutan dan lahan.
Penulis	Bagaimana harapan DLHK terhadap pelaksanaan Program RHL di DAS Lemau ke depan?
Informan	Program RHL diharapkan mampu menjaga keberlanjutan kawasan hutan, meminimalkan konflik pemanfaatan lahan, serta terus memperkuat koordinasi antar stakeholder agar hasil rehabilitasi dapat dipertahankan dalam jangka panjang.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Muharram Effendi S.Ikom

Jabatan : Kepala Bidang

Instansi : KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Penulis	Apa peran KHDTK Universitas Muhammadiyah Bengkulu dalam pengelolaan kawasan hutan?
Informan	KHDTK merupakan salah satu unit kampus yang diberi amanah oleh negara untuk menjaga, melestarikan, dan melindungi kawasan hutan. Kawasan KHDTK UMB berada di perbatasan Kabupaten Kepahiang dan Kabupaten Bengkulu Tengah dengan luas sekitar 1.992,69 hektar sesuai SK Menteri Kehutanan Nomor 11 Tahun 2016
Penulis	Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan KHDTK dalam mendukung pelestarian hutan?
Informan	KHDTK telah melaksanakan berbagai kegiatan seperti sosialisasi kepada masyarakat dan pemerintah desa, menjalin kolaborasi dengan masyarakat sekitar kawasan, melakukan kegiatan konservasi, penanaman pohon, serta kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai tujuan khusus KHDTK.
Penulis	Apakah KHDTK pernah melakukan penanaman di wilayah hulu DAS atau kawasan lain di luar sekitar KHDTK?
Informan	Hingga saat ini kegiatan penanaman masih difokuskan pada kawasan KHDTK sesuai Rencana Jangka Panjang Pengelolaan (LPJP) yang sedang disusun. Penataan kawasan dilakukan berdasarkan blok konservasi, pendidikan, pelatihan, kebudayaan, dan fungsi lainnya sesuai arahan Kementerian Kehutanan.
Penulis	Apakah KHDTK menjalin kerja sama dengan pemerintah atau stakeholder lain dalam kegiatan konservasi?
Informan	KHDTK telah menjalin kerja sama melalui MoU dengan Kementerian Kehutanan, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, Pemerintah Kabupaten Kepahiang, pemerintah desa sekitar kawasan, serta melakukan koordinasi dengan DLHK Provinsi Bengkulu, KPHL Bukit Daun, dan BPDAS Ketahun dalam mendukung pelestarian hutan.
Penulis	Bagaimana struktur organisasi KHDTK dalam menjalankan tugas pengelolaan kawasan?

Informan	KHDTK memiliki struktur organisasi yang menjalankan fungsi pengelolaan kawasan sesuai pembagian tugas masing-masing. Setiap bagian melaksanakan tugas berdasarkan bidangnya dalam mendukung konservasi, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, serta pengelolaan kawasan hutan.
Penulis	Apakah KHDTK memberikan masukan dalam perencanaan kegiatan konservasi atau rehabilitasi hutan?
Informan	KHDTK menyusun sendiri Rencana Jangka Panjang Pengelolaan (LPJP) yang menjadi pedoman pengelolaan kawasan selama lima sampai dua puluh tahun ke depan. Penyusunan tersebut mengacu pada ketentuan Kementerian Kehutanan dan diajukan untuk memperoleh pengesahan.
Penulis	Apakah tujuan KHDTK sejalan dengan tujuan stakeholder lainnya?
Informan	Tujuan KHDTK sejalan dengan pemerintah dan stakeholder lainnya, yaitu menjaga kelestarian kawasan hutan. Selama ini tidak terdapat perbedaan pendapat yang berarti karena komunikasi, koordinasi, dan saling mendukung terus dilakukan, termasuk pelaporan rutin kepada Kementerian Kehutanan.

- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : Hamidan

Jabatan : Masyarakat Desa Susup

Instansi : -

Pihak	Uraian
Penulis	Apakah Bapak mengetahui adanya Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL)?
Informan	“Iya, saya mengetahui adanya Program RHL dari pemerintah desa yang mengundang masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi.”
Penulis	Dari mana Bapak memperoleh informasi mengenai Program RHL?
Informan	“Informasi saya peroleh saat mengikuti sosialisasi yang diadakan pemerintah bersama pihak yang melaksanakan program.”
Penulis	Apakah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi Program RHL?
Informan	“Iya, saya mengikuti kegiatan sosialisasi dan dijelaskan mengenai tujuan serta pelaksanaan Program RHL.”
Penulis	Apa saja yang dijelaskan pada saat sosialisasi?
Informan	“Dijelaskan mengenai tujuan rehabilitasi hutan dan lahan, pentingnya menjaga kawasan hutan, serta manfaat program bagi masyarakat.”
Penulis	Apakah Bapak pernah ikut dalam kegiatan penanaman?

Informan	“Saya tidak ikut melakukan penanaman karena yang melaksanakan penanaman adalah kelompok tani dan pemilik lahan yang telah ditentukan.”
Penulis	Menurut Bapak, apakah tujuan Program RHL sudah dipahami masyarakat?
Informan	“Menurut saya sudah dipahami karena masyarakat mengetahui bahwa program ini bertujuan menjaga hutan dan memperbaiki kondisi lingkungan.”
Penulis	Bagaimana komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah selama pelaksanaan Program RHL?
Informan	“Komunikasi berjalan melalui pemerintah desa, kegiatan sosialisas, dan pendampingan dari pihak yang melaksanakan program.”
Penulis	Apakah masyarakat diberi kesempatan menyampaikan pendapat?
Informan	“Iya, saat sosialisasi masyarakat dapat bertanya dan menyampaikan pendapat mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan.”
Penulis	Apakah Bapak percaya Program RHL dilaksanakan secara terbuka?
Informan	“Iya, karena sebelum kegiatan dilaksanakan masyarakat diberikan penjelasan mengenai program.”
Penulis	Bagaimana pembagian peran menurut Bapak?
Informan	“Pemerintah mengoordinasikan kegiatan, BPDAS dan KPHL memberikan pendampingan, sedangkan kelompok tani melaksanakan penanaman.”
Penulis	Apa manfaat yang Bapak rasakan?
Informan	“Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai pelestarian hutan serta menerima bibit tanaman.”

- IDENTITAS RESPONDEN

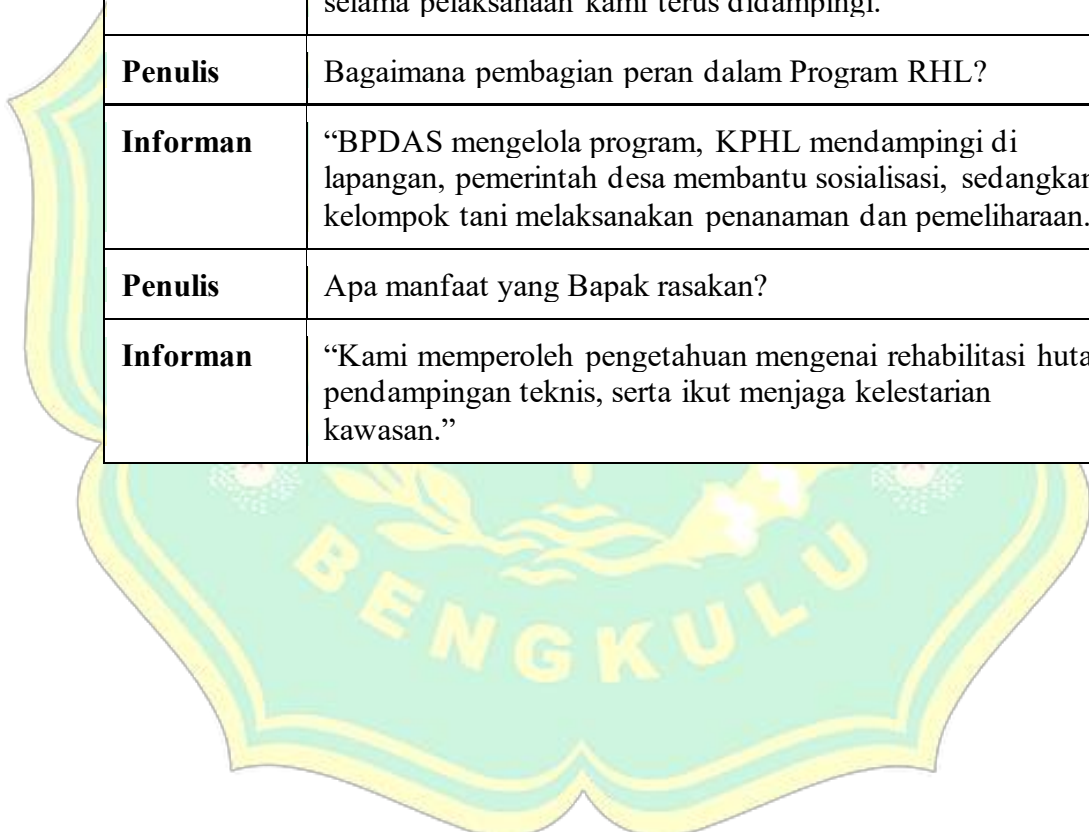
Nama : TH

Jabatan : Anggota kelompok tani Desa Penembang

Instansi : -

Pihak	Uraian
Penulis	Apakah Bapak mengetahui Program RHL?
Informan	“Iya, saya mengetahui Program RHL dari kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh kelompok tani.”
Penulis	Dari mana memperoleh informasi mengenai Program RHL?
Informan	“Informasi saya peroleh dari sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah bersama BPDAS dan KPHL.”
Penulis	Apakah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi?
Informan	“Iya, saya mengikuti kegiatan sosialisasi sebelum pelaksanaan penanaman.”
Penulis	Apakah Bapak ikut dalam kegiatan penanaman?
Informan	“Iya, sebagai anggota kelompok tani saya ikut melaksanakan penanaman sesuai pembagian tugas.”
Penulis	Apakah Bapak ikut dalam pemeliharaan tanaman?
Informan	“Iya, kelompok tani juga melakukan pemeliharaan terhadap tanaman yang sudah ditanam.”
Penulis	Menurut Bapak apa tujuan Program RHL?

Informan	“Tujuannya memulihkan kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan serta menjaga kelestarian lingkungan.”
Penulis	Bagaimana komunikasi antara kelompok tani dengan stakeholder?
Informan	“Komunikasi berjalan melalui sosialisasi, pendampingan, serta koordinasi dengan BPDAS, KPHL, dan pemerintah desa.”
Penulis	Apakah kelompok tani dapat memberikan masukan?
Informan	“Iya, kami diberikan kesempatan menyampaikan pendapat mengenai pelaksanaan kegiatan dan jenis bibit yang akan ditanam.”
Penulis	Apakah Bapak percaya stakeholder melaksanakan Program RHL dengan baik?
Informan	“Iya, karena sejak awal kegiatan dijelaskan secara terbuka dan selama pelaksanaan kami terus didampingi.”
Penulis	Bagaimana pembagian peran dalam Program RHL?
Informan	“BPDAS mengelola program, KPHL mendampingi di lapangan, pemerintah desa membantu sosialisasi, sedangkan kelompok tani melaksanakan penanaman dan pemeliharaan.”
Penulis	Apa manfaat yang Bapak rasakan?
Informan	“Kami memperoleh pengetahuan mengenai rehabilitasi hutan, pendampingan teknis, serta ikut menjaga kelestarian kawasan.”



- IDENTITAS RESPONDEN

Nama : R (nama disamarkan)

Jabatan : Masyarakat Desa Penembang

Instansi : -

Pihak	Uraian
Penulis	Apakah Bapak mengetahui Program RHL?
Informan	“Iya, saya mengetahui Program RHL dari kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan sebelum program dimulai.”
Penulis	Apakah Bapak mengikuti kegiatan sosialisasi?
Informan	“Iya, saya mengikuti sosialisasi bersama anggota kelompok tani lainnya.”
Penulis	Apa yang disampaikan dalam kegiatan sosialisasi?
Informan	“Dijelaskan mengenai tujuan program, lokasi penanaman, jenis bibit, pembagian tugas, dan cara pelaksanaan kegiatan.”
Penulis	Apakah kelompok tani dilibatkan dalam pelaksanaan Program RHL?
Informan	“Iya, kelompok tani menjadi pelaksana utama kegiatan penanaman di lapangan.”
Penulis	Apakah kelompok tani ikut menentukan jenis bibit yang ditanam?
Informan	“Iya, kami diberikan kesempatan menyampaikan masukan mengenai jenis bibit yang sesuai dengan kondisi lahan.”

Penulis	Bagaimana komunikasi antara kelompok tani dengan BPDAS dan KPHL?
Informan	“Komunikasi berjalan dengan baik melalui sosialisasi, pendampingan, dan koordinasi selama kegiatan berlangsung.”
Penulis	Apakah komunikasi berlangsung setelah kegiatan penanaman?
Informan	“Iya, komunikasi tetap dilakukan saat monitoring dan pemeliharaan tanaman.”
Penulis	Apakah Bapak percaya kepada stakeholder yang melaksanakan Program RHL?
Informan	“Iya, karena mereka selalu memberikan pendampingan dan informasi secara terbuka selama kegiatan berlangsung.”
Penulis	Bagaimana pembagian peran menurut Bapak?
Informan	“BPDAS sebagai penyelenggara program, KPHL sebagai pendamping lapangan, pemerintah desa membantu pelaksanaan kegiatan, sedangkan kelompok tani melaksanakan penanaman dan pemeliharaan.”
Penulis	Apa manfaat Program RHL bagi kelompok tani?
Informan	“Program ini membantu menjaga kelestarian hutan, memberikan pengetahuan mengenai rehabilitasi, serta meningkatkan kepedulian kelompok tani terhadap kawasan hutan.”
Penulis	Bagaimana keterlibatan kelompok tani selama pelaksanaan Program RHL?
Informan	“Kelompok tani terlibat mulai dari sosialisasi, rapat koordinasi, pelaksanaan penanaman, hingga pemeliharaan dan monitoring tanaman.”

LAMPIRAN II DOKUMENTASI WAWANCARA







UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765
 ● fisip.umb.ac.id ☎ (0736) 26161
 ● fisipol@umb.ac.id

Nomor : 255-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 3 Juni 2026

Kepada Yth : Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus {KHDTK} Universitas Muhammadiyah
 Bengkulu
 di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

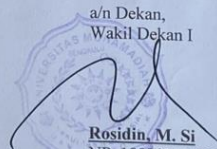
Nama : AULIA OLIVIANI
 NPM : 2263201051
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Collaborative Governance dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah**", penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 4 Juni 2026 – 4 Juli 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

a/n Dekan,
 Wakil Dekan I


Rosidin, M. Si
 NP. 19820112 200904 1 080

umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

um bengkulu
 um bengkulu
 um Bengkulu

um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz

humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

um bengkulu
 um bengkulu
 um Bengkulu

um bengkulu
 umb tv
 Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz


FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765
 fisip.umb.ac.id ☎ (0736) 26161
 fisipol@umb.ac.id

Nomor : 255-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 3 Juni 2026

Kepada Yth : Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai {BPDAS} Ketahun Provinsi Bengkulu
 di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

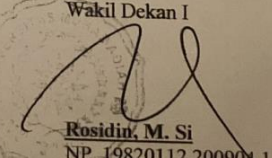
Nama : AULIA OLIVIANI
 NPM : 2263201051
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Collaborative Governance dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah**". penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 4 Juni 2026 – 4 Juli 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

a/n Dekan,
 Wakil Dekan I


Rosidin, M. Si
 NP. 19820112 200904 1 080

umb.ac.id
 humas@umb.ac.id
 0822-3546-1991

um bengkulu
 um bengkulu
 um Bengkulu

um bengkulu
 umb tv
 Radio Ijazrah FM 104.3 MHz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ☎ (0736) 22765
 ● fisip.umb.ac.id ☎ (0736) 26161
 ● fisipol@umb.ac.id

Nomor : 307-SI/DF.7/IL3.AU/C/2026
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 28 Juni 2026

Kepada Yth : Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Bengkulu
 di
 Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : AULIA OLIVIANI
 NPM : 2263201051
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul "**Analisis Collaborative Governance dalam Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah**". penelitian ini akan dilaksanakan di Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 29 Juni 2026 – 29 Juli 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

a/n Dekan,
 Wakil Dekan I

Rosidin, M. Si
 NP: 19820112 200904 1 080

● umb.ac.id
 ● humas@umb.ac.id
 ● 0822-3546-1991

● um.bengkulu
 ● um.bengkulu
 ● um.bengkulu

● um.bengkulu
 ● umb.tv
 ● Radio Izzirah FM 104.3 M.Hz



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

● Kampus IV, Jl. Adam Malik KM 8.5, Sido Mulyo, Gading Cempaka, Kota Bengkulu, 38221 ● (0736) 22765
 ● fisip.umb.ac.id ● (0736) 26161
 ● fisipol@umb.ac.id

Nomor : 316-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026
 Lamp : 1 berkas
 Perihal : Izin Penelitian

Bengkulu, 2 Juli 2026

Kepada Yth : Kepala UPTD KPHL Bukit Daun (Unit III) Provinsi Bengkulu
 di

Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, dengan ini kami sampaikan bahwa dalam rangka menunjang Penulisan Karya Ilmiah/Skripsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu, kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu/Saudar untuk dapat memberi izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama : AULIA OLIVIANI
 NPM : 2263201051
 Program Studi : Administrasi Publik

Untuk melaksanakan penelitian dengan judul **"Anaisis Collaborative Governance dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah"**, penelitian ini akan dilaksanakan di UPTD KPHL Bukit Daun (Unit III) Provinsi Bengkulu dalam rangka penyusunan Tugas Akhir (Skripsi/Karya Ilmiah) dari Tanggal 2 Juli 2026 – 2 Agustus 2026. Sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini kami lampirkan proposal penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

a/n Dekan,
 Wakil Dekan I

Rosidin, M. Si
 NP. 19820112 200904 1 080

● umb.ac.id
 ● humas@umb.ac.id
 ● 0822-3546-1991

● um bengkulu
 ● um bengkulu
 ● um Bengkulu

● um bengkulu
 ● umb tv
 ● Radio Jazirah FM 104,3 M.Hz



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
PROVINSI BENGKULU
UPTD KPHL BUKIT DAUN**

Jl. Beringin No. 65 Padang Jati Bengkulu

Nomor : B.500.4 / 51 / KPHL / 2026
Lampiran : -
Perihal : Persetujuan Izin Penelitian

Bengkulu, 2 Juli 2026
Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik
Universitas Muhammadiyah Bengkulu
di -
Bengkulu

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor :316-SI/DF.7/II.3.AU/C/2026 Tanggal 2 Juli 2026 Perihal Izin Penelitian atas nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama / NPM	Judul Penelitian
1.	Aulia Oliviani / 2263201051	Analisis Collaborative Governance dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah

yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 2 Juli 2026 s/d 2 Agustus 2026 di UPTD KPHL Bukit Daun (Unit III) Provinsi Bengkulu, maka pada prinsipnya kami menyetujui penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Jika ada kunjungan ke dalam Kawasan Hutan selama melaksanakan penelitian dilarang :
 - a. Mengganggu, merusak dan mengambil flora maupun fauna yang ada di kawasan Hutan Lindung Bukit Daun.
 - b. Menyalakan api di dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang dapat mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan.
 - c. Membuang sampah organik maupun non organik dalam kawasan hutan.
2. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian kepada Kepala KPHL Bukit Daun disertai dokumentasi kegiatan.
3. Untuk data-data pendukung yang diminta dapat dibuat daftarnya dan dikomunikasikan kembali dengan UPTD KPHL Bukit Daun.

Demikian surat persetujuan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KEPALA UPTD KPHL BUKIT DAUN
YUDI RISWANDA, S. Hut
 NIP. 19770926 200502 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu (sebagai laporan).
2. Arsip.



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Jalan Pembangunan Padang Harapan Telp. (0736) 20091-22856 Fax (0736) 22856

Bengkulu, 13 Juli 2026

Nomor : B.500.4.7.11/236/DLHK. V/2026
 Sifat : Biasa
 Lam : -
 Hal : Persetujuan Izin Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Bengkulu
 di -
 Bengkulu

Menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Bengkulu Nomor: 307/SI/DF.7/II.3.AU/C/2026 Tanggal 28 Juni 2026 Perihal Izin Penelitian atas nama mahasiswa sebagai berikut:

No.	Nama/NPM	Judul Penelitian
1	Aulia Oliviani/2263201051	Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai Lemau di Kabupaten Bengkulu Tengah

Yang akan dilaksanakan terhitung mulai tanggal 29 Juni 2026 s/d 29 Juli 2026 di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu, maka pada prinsipnya kami menyetujui penelitian tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penelitian dilakukan pada areal daerah aliran sungai lemau Kabupaten Bengkulu Tengah sesuai dengan judul penelitian.
2. Selama melaksanakan kegiatan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan DAS Ketahun dan KPHL Bukit Daun terkait kebutuhan data dan informasi pendukung lainnya.
4. Menyampaikan laporan tertulis hasil penelitian kepada Kepala Dinas Lingkungan dan Kehutanan disertai dokumentasi kegiatan.

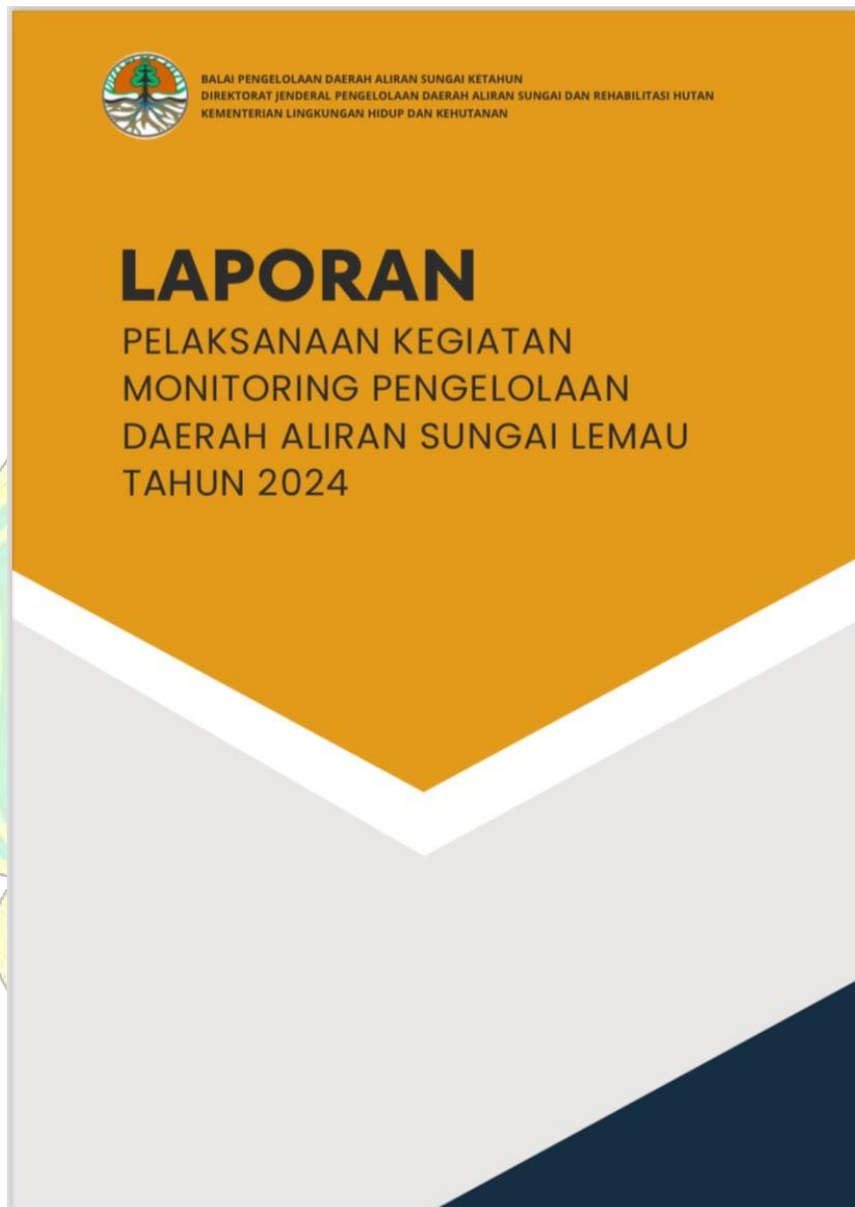
Demikian surat persetujuan penelitian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

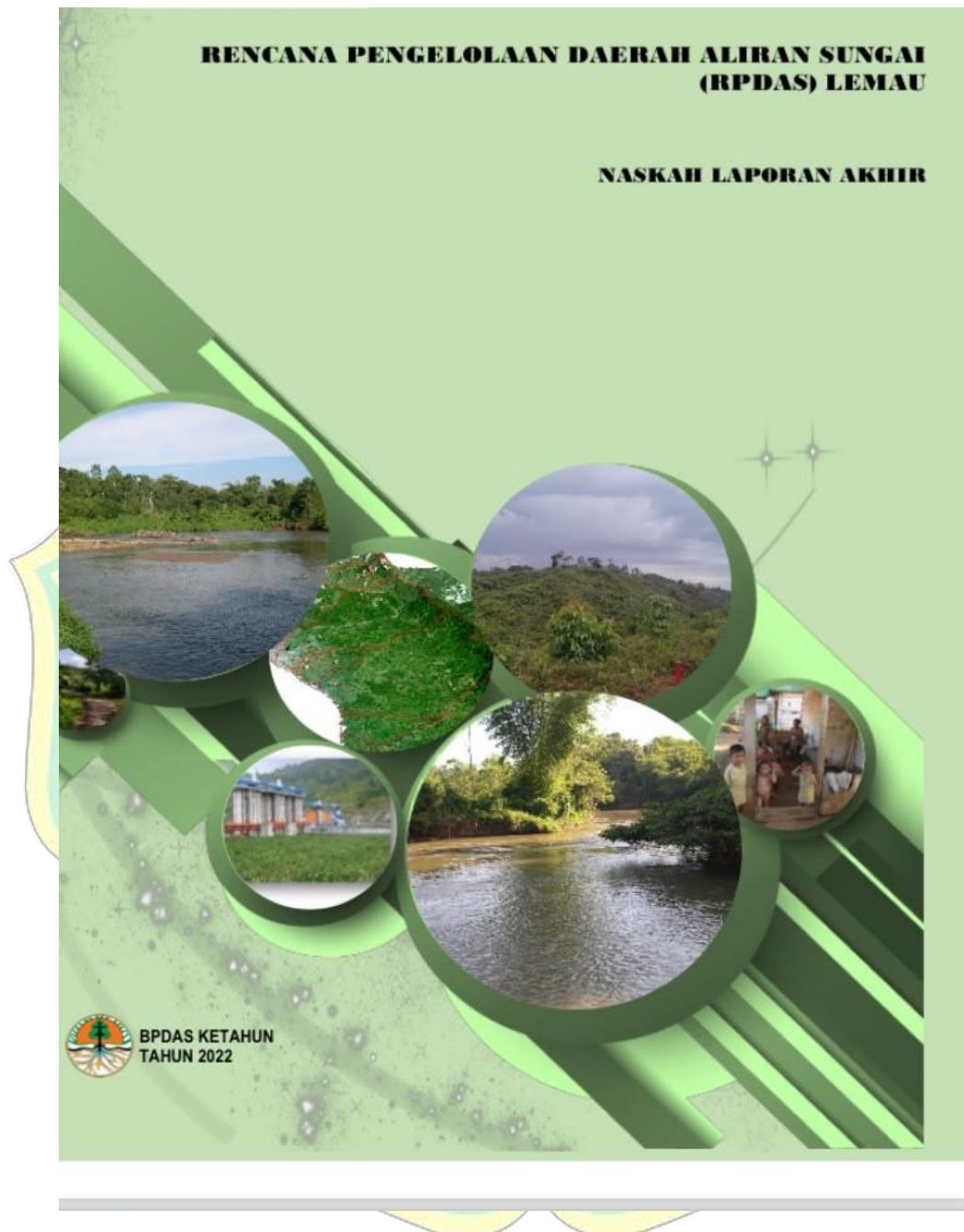
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan
 Kehutanan Provinsi Bengkulu,



Ir. Safnizar, S.Hut., MP
 Pembina Tk. I/ IV.b
 NIP. 19720322 199803 2 003

LAMPIRAN IV
DATA
(Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring
Pengelolaan DAS Lemau tahun 2024)



RENCANA PENGELOLAAN DAS LEMAU TAHUN 2022

**(LUAS ADMINISRTRASI DAS LEMAU KE SELURUHAN)
SUMBER ; Laporan Pelaksanaan Kegiatan Monitoring
Pengelolaan DAS Lemau tahun 2024)**

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Administrasi Desa	Luas Desa pada DAS Lemau
1.	Bengkulu Tengah	Bang Haji	Air Napal	427,64	427,64
			Bang Haji	493,49	493,49
			Genting	1.112,81	1.112,81
			Lubuk Langkap	1.414,34	1.414,34
			Padang Berunai	453,35	453,35
			Sekayun	350,94	350,94
			Sekayun Hilir	190,53	190,53
			Sekayun Mudik	426,73	426,73
			Sungkai Berayun	205,74	205,74
			Taba Tengah	447,22	447,22
			Talang Donok	738,29	738,29
			Talang Panjang	791,38	791,38
2.	Bengkulu Tengah	Karang Tinggi	Pelajau	1.049,18	78,67
3.	Bengkulu Tengah	Merigi Kelindang	Jambu	335,14	303,04
			Kelindang	310,10	17,78
			Kelindang Atas	453,67	275,58
			Lubuk Unen	1.585,92	1.095,90
			Penembang	701,61	169,49
			Pungguk Beringin	697,60	7,02
			Pungguk Ketupak	592,58	204,28
			Taba Durian Sebakul	663,14	647,94
			Talang Ambung	4.198,69	3.991,86
			Ulak Lebar	753,29	496,45
4.	Bengkulu Tengah	Merigi Sakti	Arga Indah II	526,77	526,77
			Bajak Tiga	122,36	122,36
			Curup	510,46	510,46
			Durian Lebar	180,50	180,50
			Karang Panggung	614,05	614,05
			Komering	493,65	493,65
			Lubuk Pendam	428,52	428,52
			Lubuk Puar	925,42	882,22
			Pagar Agung	834,94	834,94
			Pagar Besi	307,52	307,52
			Pungguk Jaya	218,47	218,47
			Punjung	176,66	176,66
			Rajak Besi	809,57	809,57
			Susup	378,31	378,31
			Taba Gemantung	196,78	196,78

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Administrasi Desa	Luas Desa pada DAS Lemau
5.	Bengkulu Tengah	Pagar Jati	Arga Indah I	377,84	377,84
			Datar Penokat	915,26	915,26
			Karang Are	1.799,22	1.794,36
			Keroya	75,74	75,74
			Kerta Pati	339,10	339,10
			Kertapati Mudik	209,81	209,81
			Layang Lekat	271,28	271,28
			Pagar Jati	701,44	701,44
			Rena Jaya	79,16	79,16
			Rena Kandis	322,30	322,30
			Taba Renah	258,13	258,13
			Talang Curup	348,40	348,40
			Temiang	520,86	520,86
			Tumbuk	192,60	192,60
6.	Bengkulu Tengah	Pematang Tiga	Air Kotok	1.241,11	1.241,11
			Aturan Mumpo	504,24	444,83
			Aturan Mumpo II	482,34	350,17
			Batu Beriang	1.377,66	1.377,66
			Genting Dabuk	511,08	511,08
			Kebun Lebar	399,12	399,12
			Kota Titik	419,16	419,16
			Pematang Tiga	196,76	196,76
			Pematang Tiga Lama	73,48	73,48
			Senabah	245,47	71,31
			Talang Tengah II	513,41	513,41
			Tanjung Kepahyang	746,53	746,53
			Tiambang	309,31	309,31
7.	Bengkulu Tengah	Pondok Kelapa	Abu Sakim	260,03	260,03
			Bintang Selatan	28,06	28,06
			Harapan	1.017,91	990,63
			Kembang Ayun	256,05	256,05
			Padang Betuah	2.539,18	1.765,81
			Pagar Dewa	282,53	282,53
			Panca Mukti	185,89	185,89
			Pasar Pedati	1.102,02	842,91
			Pekik Nyaring	1.261,04	30,57
			Pondok Kelapa	1.304,00	1.282,62
			Sidodadi	379,62	379,62
			Sidorejo	511,56	511,56

No.	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Luas Administrasi Desa	Luas Desa pada DAS Lemau
			Sri Kuncoro	767,19	54,93
			Srikaton	356,76	197,52
			Sunda Kelapa	256,52	256,52
			Talang Boseng	578,47	578,47
			Talang Pauh	367,02	367,02
8.	Bengkulu Tengah	Pondok Kubang	Batu Raja	1.501,50	1.096,67
			Linggar Galing	348,75	155,85
			Paku Haji	986,74	986,74
			Talang Tengah I	479,32	362,99
			Tanjung Dalam	456,98	117,26
9.	Bengkulu Utara	Kerkap	Aur Gading	5.220,95	2.840,63
			Banyu Mas Baru	237,96	237,96
			Banyu Mas Lama	296,75	296,75
			Kedu Baru	242,38	1,22
			Lubuk Durian	419,98	210,87
			Lubuk Jale	568,35	2,30
			Magelang	238,91	227,40
			Penyangkak	131,38	4,90
			Perbo	339,22	163,70
			Salam Harjo	147,24	147,24
			Serumbung	248,80	248,80
			Simpang Ketenong	261,70	120,59
			Talang Curup	248,98	248,98
			Talang Jambu	1.272,33	471,00
			Talang Pasak	325,29	325,29
			Tebat Pacur	331,17	331,17
			Yogya Baru	184,33	184,33
10.	Bengkulu Utara	Tanjung Agung Palik	Lubuk Pendam	299,80	0,48
			Sengkuang	474,69	360,45
11.	Kepahiang	Ujan Mas	Suro Bali	603,23	7,43
			Suro Ilir	689,94	1,92
			Tanjung Alam	1.352,95	15,57
12.	Rejang Lebong	Bermani Ulu	Air Pikat	971,84	8,34
			Tebat Pulau	572,08	19,20
			Tebat Tenong Dalam	545,70	26,61
13.	Rejang Lebong	Curup Selatan	Air Lanang	1.410,70	4,94



KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI DAN REHABILITASI HUTAN
BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI KETAHUN
 Jl. Jati No. 39 Sawah Lebar Bengkulu – 38228
 Telepon : (0736) 21129, Faximile : (0736) 24522

BERITA ACARA

Nomor: BA. **94** /BPDAS.KTN/PKDas/DAS.01.10/B/06/2025

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Kami masing-masing:

Nama : Remran, S.Hut., M.Si

NIP : 196804101997011003

Jabatan : Kepala Balai Pengelolaan DAS Ketahun

Alamat : Jl. Jati No.39, Sawah Lebar, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : M. Yunus

NIK : 1709062601810001

Jabatan : Ketua Gapoktan Cuup Midar

Alamat : Desa Panembang, Kecamatan Merigi Kelindang,
Kabupaten Bengkulu Tengah

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Gapoktan Cuup Midar, berdasarkan Keputusan Kepala Desa Panembang nomor: 10/KPTS/KD/PNB/2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penetapan Gapoktan Cuup Midar serta SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor: SK.8493/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2019, tanggal 9 Desember 2019 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan kepada Gabungan Kelompok Tani Cuup Midar seluas ± 688 hektar pada Kawasan Hutan Lindung Bukit Daun, Desa Panembang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** membuat kesepakatan tentang rencana pelaksanaan kegiatan penanaman RHL secara vegetatif Tahun 2025 yang diatur sebagaimana pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk melaksanakan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif berupa kegiatan penanaman yang berlokasi pada kawasan Hutan Lindung Bukit Daun yang berdekatan dengan Desa Panembang, Kecamatan Merigi Kelindang, Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pasal 2

Kedua belah pihak bersepakat bahwa kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif penanaman sebagaimana pada Pasal 1 diatas dilaksanakan berdasarkan dari hasil Penyusunan/Review Rancangan RHL T-0 tahun 2025 yang berupa naskah dan peta rancangan seluas 20 hektar.

Notulen

Sosialisasi Pelaksanaan RHL P0 Tahun 2025

Hari / Tanggal : Rabu / 25 Juli 2024
 Waktu : 09.00 WIB s.d Selesai
 Tempat : Balai Desa Penembang Kec. Merigi Kelindang Kab. Bengkulu Tengah
 Agenda : Sosialisasi Pelaksanaan RHL P0 Tahun 2025
 Pimpinan : Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS BPDAS Ketahun
 Peserta : 43 orang
 Notulis : Eef K. Abdiawan, S.Hut.

Hasil :

1. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka Sosialisasi Pelaksanaan RHL P0 Tahun 2025.
2. Kegiatan diawali dengan acara pembukaan. Pembukaan dipandu oleh Ibu Rika Aldina Hasibuan, S.Hut, dengan pengantar dari Kepala KPHL Bukit Daun sekaligus membuka acara. Hal-hal yang disampaikan dalam pengantar kegiatan yang disampaikan Kepala KPHL Bukit Daun adalah sebagai berikut:
 - Wilayah Bukit Daun telah mengantongi izin Perhutanan Sosial ± 24.711 ha.
 - Sangat membutuhkan dukungan berbagai pihak.
 - Beberapa izin PS ditanami palawija, bahkan ada beberapa yang melakukan penanaman sawit.
 - Rencana pelaksanaan RHL pada tahun 2025 adalah 20 hektar.
 - Harapannya kelompok dan pemerintah desa mendukung pelaksanaan RHL. Komoditas unggulan yang akan dikembangkan adalah aren. Nanti kelompok akan dibimbing dan difasilitasi, misalnya mengunjungi wilayah/daerah yang telah berhasil membudidayakan dan produksi aren.

Setelah pembukaan dan arahan dari KPHL Bukit Daun, acara dilanjutkan dengan doa dan ditutup sementara untuk dilanjutkan ke sesi acara berikutnya.
3. Acara pemaparan materi dan diskusi dipandu oleh Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS BPDAS Ketahun (Bapak Maman Sudirman, S.Hut., M.M). Acara diawali dengan pemaparan materi dari beberapa narasumber, Pemateri dan poin-poin hal disampaikan diantaranya:
 - a. Kepala Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat DLHK Provinsi Bengkulu (**Dr. SUSILAWATY, S.Sos, M.Kes**).

Lampiran 1.
 Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Ketahun
 Nomor : 65 Tahun 2026
 Tanggal : 6 Juli 2026

**NAMA PERSONIL TENAGA PENDAMPING DAN LOKASI PENETAPAN
 KEGIATAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN PERTAMA (PI) TAHUN 2026**

Nama/NIP	Jabatan/Intansi	Nama Kelompok Dampingan	Luas	BLOK	Alamat/Lokasi Kelompok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Zeplin Haryono, S. Hut NIP. 19740927 200903 1 003	Penelaah Teknis Kebijakan/KPPL Bukit Daun	GAPOKTAN Cuup Midar	20 ha	-	Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah
JUMLAH			20 Ha		

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



WITARYA, S. HUT.T., M. Eng
 NIP. 19730917 199301 1001



DOKUMENTASI

Pembukaan Acara



Penyampaian Materi



	
 25 Juni 2025 3,64906S 102,47129E 78° F Kampung Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Berau Berau, Kalimantan	
Diskusi dan Pembahasan Kesepakatan	
	



Foto Bersama Peserta, Narasumber dan Panitia